

SIARAN PERS

Pemberdayaan Perempuan Sejahteraan Anak

UNICEF mengidentifikasi tiga hal penting untuk memperbaiki kesetaraan kaum perempuan di Indonesia: akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pengatasan akar masalah eksploitasi seksual, dan perbaikan layanan kesehatan bagi perempuan

Jakarta, 23 Januari 2007 – Menghapus diskriminasi gender dan memberdayakan perempuan akan memiliki pengaruh yang sangat besar dan positif bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak, demikian laporan tahunan UNICEF, *Laporan Situasi Anak Dunia 2007*, yang diluncurkan di Jakarta hari ini oleh Prof. Meutia Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Kesetaraan gender memberikan “keuntungan ganda” yang membawa manfaat bagi perempuan dan anak, serta sangat penting bagi kesehatan dan perkembangan keluarga, masyarakat dan bangsa. Jika perempuan berdaya untuk hidup seutuhnya dan produktif, maka anak dan keluarga akan sejahtera. Menurut laporan ini, pengaruh perempuan dalam pembuatan keputusan-keputusan kunci akan memperbaiki kehidupan perempuan dan berakibat positif pada kesejahteraan dan perkembangan anak.

Di Indonesia, UNICEF mengidentifikasi tiga hal penting yang memerlukan upaya lebih lanjut dan mendesak guna memperbaiki kesetaraan kaum perempuan: akses ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, memerangi akar penyebab eksploitasi seksual, serta perbaikan layanan kesehatan bagi perempuan hamil.

“Tindakan-tindakan di bidang ini akan mendatangkan manfaat yang praktis dan langsung bisa dirasakan oleh kaum perempuan dan masyarakat,” kata Dr. Gianfranco Rotigliano, Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia.

Laporan ini juga mencatat secara global bahwa meskipun status perempuan sudah mengalami kemajuan selama beberapa dasawarsa terakhir, kehidupan jutaan anak perempuan dan perempuan dewasa dibayangi oleh diskriminasi, ketidakberdayaan dan kemiskinan. Anak perempuan dan perempuan yang terkena HIV/AIDS menanggung lebih banyak beban daripada laki-laki, dan perempuan sering berpenghasilan lebih sedikit daripada laki-laki meskipun pekerjaan mereka sejajar. Jutaan perempuan di seluruh dunia menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual, dan sedikit peluangnya untuk mendapatkan keadilan. Sebagai akibat diskriminasi, anak perempuan berpeluang lebih kecil untuk bersekolah, bisa dikatakan satu dari lima anak perempuan yang bersekolah di sekolah dasar di negara berkembang tidak menyelesaikan pendidikannya. Tingkat pendidikan diantara kaum perempuan, menurut laporan ini, berhubungan dengan tingkat kelangsungan hidup dan perkembangan anak yang lebih baik.

“Indonesia telah membuat kemajuan yang baik dalam hal kesetaraan gender di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Namun demikian, semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin terbatas akses anak-anak,” ujar Dr. Rotigliano.

Beberapa kendala yang menghambat tercapainya kesetaraan gender di bidang pendidikan adalah belum memadainya program-program yang secara langsung ditujukan untuk mengatasi masalah akses dan partisipasi anak-anak yang kurang beruntung, khususnya anak-anak perempuan yang

miskin dan terpinggirkan; pernikahan dini; buku teks yang bias gender; standar ganda terhadap perempuan (*gender stereotyping*); serta data menurut jenis kelamin di tingkat nasional dan daerah yang kurang handal.

Kemiskinan, kurangnya peluang ekonomi dan pendidikan, serta status perempuan yang masih dianggap rendah membuat para perempuan rawan terhadap eksploitasi seksual dan perdagangan orang, demikian Dr. Rotigliano mengingatkan.

“Persoalannya kembali lagi pada akses ke pendidikan. Jika kita bisa menjamin bahwa anak-anak, khususnya anak perempuan bersekolah, di kelak kemudian hari mereka akan lebih mampu menghidupi diri sendiri dan tidak menjadi rawan terhadap para pelaku perdagangan orang dan eksploitasi,” ujar Dr. Rotigliano.

Keuntungan yang didapat dari kesetaraan gender tidak hanya dirasakan langsung oleh anak. *Laporan Situasi Anak Dunia* menunjukkan bagaimana kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan – Tujuan Pembangunan Milenium yang ketiga – akan mendukung tercapainya tujuan-tujuan lainnya, dari pengentasan kemiskinan dan kelaparan hingga ke penyelamatan hidup anak, perbaikan kesehatan ibu, jaminan bagi berlangsungnya pendidikan untuk semua, pemberantasan HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya, serta terjaminnya lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Di Indonesia, sekitar 20.000 perempuan meninggal setiap tahunnya akibat komplikasi kehamilan. Angka Kematian Ibu sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN, dan penurunan angka kematian ini masih menjadi prioritas tinggi dalam isu pembangunan. Sebagian besar kasus kematian ibu sebenarnya bisa dicegah dengan peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduktif yang bermutu serta penggunaan tenaga persalinan yang trampil.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium dalam hal pengurangan Angka Kematian Ibu sebanyak 75%, Indonesia harus segera mengambil tindakan-tindakan dan membuat berbagai upaya, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Upaya penurunan Angka Kematian Ibu akan menunjukkan komitmen terhadap perbaikan kesetaraan bagi kaum perempuan,” kata Dr. Rotigliano.

Peta menuju kesetaraan gender

Laporan Situasi Anak Dunia 2007 menyebutkan tujuh tindakan utama untuk mencapai kesetaraan gender:

- **Pendidikan:** Tindakan-tindakan utama yang bisa diambil antara lain membebaskan biaya sekolah dan mendorong orang tua serta masyarakat untuk berinvestasi pada pendidikan anak perempuan.
- **Keuangan:** Pengakuan yang diberikan pada sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai sasaran kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih rendah. Investasi untuk menghapus diskriminasi gender harus diintegrasikan dengan anggaran dan rencana pemerintah.
- **Perundang-undangan:** Peraturan perundangan nasional mengenai kekayaan/hak milik dan hak atas warisan harus memberi perhatian pada perempuan, disamping langkah-langkah untuk mencegah dan menanggapi kekerasan rumah tangga serta kekerasan berdasarkan gender dalam situasi konflik.
- **Jatah/kuota Legislatif:** Jatah/kuota sudah terbukti merupakan cara untuk menjamin partisipasi perempuan dalam politik. Dari 20 negara yang memiliki jumlah perempuan terbanyak di parlemen, 17 diantaranya memakai sistem jatah/kuota.
- **Perempuan memberdayakan sesama perempuan:** Gerakan perempuan pada akar rumput merupakan pejuang yang vokal bagi kesetaraan dan pemberdayaan, serta seharusnya terlibat

dalam tahap awal penyusunan kebijakan sehingga program-program dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak.

- **Mengikutsertakan laki-laki dan anak laki-laki:** Mendidik laki-laki dan anak laki-laki, juga perempuan dan anak perempuan, mengenai manfaat kesetaraan gender dan pembuatan keputusan bersama dapat membantu terciptanya hubungan yang lebih kooperatif.
- **Memperbaiki penelitian dan data:** Data dan analisa yang lebih baik sangat penting, terutama mengenai kematian ibu, kekerasan terhadap perempuan, pendidikan, lapangan kerja, gaji, jam kerja dan waktu yang tidak dibayar, serta partisipasi dalam politik.

Pembuatan keputusan dalam rumah tangga

Laporan ini mengungkapkan bahwa perempuan tidak selalu mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan penting di rumah tangga, yang bisa berakibat buruk pada anak. Hanya di 10 dari 30 negara berkembang yang diteliti ditemukan 50 persen atau lebih perempuan yang berpartisipasi dalam pembuatan semua keputusan di rumah tangga, termasuk tentang pengeluaran/pembelanjaan dalam jumlah besar, perawatan kesehatan mereka atau kunjungan mereka ke teman atau saudara di luar rumah.

Kemampuan perempuan dalam mengendalikan kehidupan mereka dan membuat keputusan yang mempengaruhi keluarga sangat berkaitan erat dengan nutrisi, kesehatan dan pendidikan anak, demikian diutarakan laporan ini. Di keluarga-keluarga yang perempuannya merupakan pembuat keputusan kunci, sumber daya yang diberikan pada anak-anak lebih besar dibandingkan di keluarga yang perempuannya hanya sedikit berperan dalam pembuatan keputusan.

Sebuah kajian yang dibuat oleh Lembaga Riset Kebijakan Pangan Internasional (*International Food Policy Research Institute*) menemukan bahwa jika laki-laki dan perempuan mempunyai pengaruh yang sama dalam pembuatan keputusan, jumlah anak berusia dibawah tiga tahun dengan “berat badan kurang” di Asia Selatan akan turun sebanyak 13%, yang berakibat pada turunnya jumlah anak kurang gizi sebanyak 13,4 juta di kawasan tersebut. Di sub-Sahara Afrika, jumlah anak yang gizinya memadai akan bertambah sebesar 1,7 juta.

Jurang perbedaan pendapatan berdasarkan gender

Karena pendapatan di tangan perempuan akan memberikan keuntungan pada anak, jurang perbedaan penghasilan berdasarkan gender dapat menurunkan atau membatasi sumber-sumber yang ada untuk memenuhi hak-hak anak, seperti perawatan kesehatan, nutrisi yang cukup dan pendidikan.

Perkiraan berdasarkan pendapatan diferensial dan partisipasi tenaga kerja menunjukkan bahwa pendapatan perempuan adalah sekitar 30% dari laki-laki di negara yang diteliti di Timur Tengah dan Afrika Utara, sekitar 40% di Amerika Latin dan Asia Selatan, 50% di sub-Sahara Afrika dan sekitar 60% di CEE/CIS, Asia Timur dan negara industri, demikian ungkap laporan UNICEF.

Ruang politik

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam sistem politik juga memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan anak. Bukti-bukti yang semakin tampak di negara industri dan berkembang menunjukkan bahwa perempuan yang duduk di badan legislatif merupakan pembela yang sangat efektif bagi anak. Namun demikian, hingga bulan Juli 2006, perempuan yang duduk di parlemen di seluruh dunia hanya berjumlah 17%.

* * * *

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
John Budd, 5705816 ext. 298, 0811-936437, jbudd@unicef.org
Kendartanti Subroto, 5705816 ext. 251, 0818-913620, ksubroto@unicef.org